



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019-2020  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

---

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Dasar Kunjungan Kerja**

Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan yaitu fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi budgeting (anggaran), fungsi kontrol (pengawasan) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Fungsi yang lain adalah menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera selatan dilaterbelakangi oleh pelaksanaan fungsi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik, reformasi birokrasi, permasalahan tenaga honorer dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, masalah perbatasan, pertanahan, kearsipan (arsip daerah), pelaksanaan e-KTP, evaluasi penggunaan Dana Desa dan Rencana Alokasi Penggunaan Dana Kelurahan.

Selain ingin mengetahui penyelenggaraan pelayanan Publik dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauh mana persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, yang akan diadakan di 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Sumatera selatan. Diharapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini berjalan lancar dan aman sehingga diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih diharapkan dapat menyukseskan Pilkada 2020.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada Keputusan DPR RI Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang Anggota yang dipimpin oleh **Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T/Ketua Komisi II DPR RI/F-PG, dan Saan Mustopa, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F-PN**, dengan Anggota tim terdiri dari :

<b>NO.</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>	<b>N A M A</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T	Ketua Tim Ketua Komisi II/ F-PG
2.	A-367	Saan Mustopa, MSi	Wakil Ketua/ F-Nasdem
3.	A-141	Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS.	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-142	Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-152	Ir. Endro Suswanto Yahman, MSc	Anggota/ F-PDI.P
6.	A-240	Drs. Cornelis, M.H	Anggota/ F-PDI.P
7.	A-302	Nusron Wahid	Anggota/ F-Golkar
8.	A-310	H. Agung Widyantoro, SH. MSi	Anggota/ F-Golkar
9.	A-71	Renny Astuti, SH, S.Pn	Anggota/ F-Gerindra
10.	A-116	M. Syamsul Lutfi, SE	Anggota/ F-Nasdem
11.	A-15	H. Yanuar Prihatin, MSi	Anggota/ F-PKB
12.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	Anggota/ F-Demokrat
13.	A-455	K.H. Aus Hidayat Nur	Anggota/F-PKS
14.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, MSi	Anggota/F-PAN
15.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Anggota/ F-PPP
16.	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H	Kasubag Rapat Set. Komisi II
17.	-----	Dicky Firmansyah, S.Sos	Sekretariat Komisi II
18.	-----	Sugiaman M. Toha, S.E	Sekretariat Komisi II
19.	-----	Eko Supriyanto, S.Kom	Sekretariat Komisi II
20.		Dr. Alim Bathoro, MSi	Tenaga Ahli
21.	-----	DR. Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
22.	-----	Helmi Darmawan	TV Parlemen
23.	-----	Ria Nur Mega	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 4 (empat) orang staf sekretariat Komisi II DPR RI, 2 (dua) Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Bagian Pemberitaan DPR RI serta perwakilan Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, BPN, ANRI, BKN, Bawaslu RI dan anggota Ombudsman RI.

## 1.2 Waktu Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2020 dan telah diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berikut:

- a. Gubernur Provinsi Sumatera selatan dan jajarannya.

- b. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kakan BPN Se-Provinsi Sumatera selatan.
- c. KPU dan Bawaslu Provinsi Se-Provinsi Sumatera selatan.

Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### A. REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK, MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SELEKSI CPNS 2019, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KEARSIPAN.

##### 1) Reformasi Birokrasi

##### a. APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2017-2019 (Dalam Triliun).

No	Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja
1	2017	8,911	7,109
2	2018	9,196	8,676
3	2019	9,849	10,533

##### b. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Adapun kebijakan pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi yaitu:

- Telah melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh perangkat daerah bertempat di ruang rapat bina praja.
- Membentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui sistem penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Nilai Indeks RB TA 2018 60,56 Kategori Baik
- Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

##### c. Permasalahan Reformasi Birokrasi

- Masih dibutuhkannya Optimalisasi Pokja RB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat sesuai dengan target yang ditetapkan
- Masih terdapat ASN yang belum paham atas ujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi pemahamana ASN tentang RB perlu ditingkatkan

##### d. Rencana Aksi

- Penerbitan *Road Map* RB Sumsel 2020-2024 terkait dengan sasaran dan indikator yang akan dicapai kedepan.

- Optimalisasi Pokja RB tahun 2020 – 2024 dengan mengidentifikasi kondisi umum hal – hal yang sudah dicapai/baik hal – hal yang perlu diperbaiki dan harapan yang ingin dicapai.
- Sosialisasi RB secara simultan, terus – menerus dan berkelanjutan atas sasaran yang akan ditempuh dalam implementasi reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah melalui : rapat – rapat, sosialisasi peraturan – peraturan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada perangkat daerah tentang RB

## 2). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas implementasi Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Publik, yaitu :
  - Penilaian ZONA HIJAU oleh Ombudsman RI
  - Penilaian SAKIP dengan nilai 78,84 atau BB
  - MoU Kemenpan RB-Pemprov Sumsel-GIZ Transformasi Jerman tentang peningkatan pelayanan publik.
  - Fakta Integritas *One Agency On Inovation* Pemprov Sumatera Selatan dan 17 Pemkab/Kota.
  - Pembentukan Klinik Inovasi pelayanan publik.
  - Tindak lanjut penyederhanaan eselonisasi.
  - Implementasi PP 72/2015 tentang Penambahan Inspektur Pembantu Investigasi.
  - Penyusunan lengkap Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab dan ABK).
- b. Rencana Aksi :
  - Fasilitas dan pembinaan peningkatan pelayanan publik di Sumatera Selatan
  - Meningkatkan jumlah inovasi pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumsel
  - Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas penerapan standar pelayanan publik, dan survey kepuasan masyarakat

## 3). Penguatan Kelembagaan

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas implementasi Reformasi Birokrasi dibidang Kelembagaan :
  - Telah ditetapkan peraturan daerah Prov. Sumsel tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - Penambahan infrastruktur Pembantu Investigasi di inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Rencana Aksi
 

Melakukan identifikasi atas pemetaan pemangkasan jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan Pemerintah provinsi Sumsel tindak lanjut atas penyederhaan birokrasi

#### **4). Penataan SDM ASN**

- a. Kebijakan Pemerintah provinsi Sumsel atas implementasi Reformasi Birokrasi dibidang SDM ASN :
  - Telah disusun analisa jabatan dan analisa beban kerja
  - Telah disusun peta jabatan dan kelas jabatan
- b. Penguatan Akuntabilitas  
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumsel dengan nilai 78,84 Kategori 'BB'
- c. Rencana Aksi
  - Melakukan paparan kinerja dalam bentuk Pohon Kinerja didepan Tim Kementerian PAN RB RI oleh Pejabat eselon II Pemprov. Sumsel.
  - Melakukan pembinaan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumsel.

#### **5). Dukungan APIP dalam RB dan Kompetensi ASN**

- a. Intensifikasi Diklat tehnik dan struktural
- b. Monitoring dan evaluasi implementasi Anjab dan ABK.
- c. Penyederhanaan dan mengurangi rentang waktu pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- d. Bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam dugaan Tipikor.
- e. Peningkatan fungsionalisasi, kompetensi, dan revitalisasi auditor untuk implementasi APIP yang masih sangat kurang.

#### **6). Implementasi e-Government dalam pelayanan publik.**

- a. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Sumsel *Digitalization* untuk mempermudah akses informasi Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Layanan *web* dan internet desa.
- d. Laporan SP4AN atau mekanisme penyelesaian masalah pelayanan publik.
- e. *Command Center* atau pusat komnado layanan tunggal komunikasi dan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak lain.
- f. Integrasi data kependudukan dengan Sislapmindak.
- g. Aplikasi Samsat Online
- h. Akses Data Pokok Kebudayaan (Dapobud).
- i. Aplikasi Sistem Informasi Keunggulan Program Olahraga Pendidikan (SI-KPOP).
- j. Aplikasi Si-CANTIK untuk online perizinan investasi.

#### **7). Implementasi Program *On Single Submission* (OSS).**

- a. Program OSS berjalan baik.
- b. Masih bermasalah dalam rekapitulasi data perizinan
- c. *Barcode Scanner* OSS belum di-*Up Grade*.
- d. Program OSS merupakan mekanisme penyederhanaan pemberian izin pemanfaatan lahan dalam kegiatan investasi yang perlu didukung Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum seluruhnya diterbitkan oleh instansi yang terkait.

## 8). Pengelolaan Kearsipan.

- a. Dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga kearsipan Daerah Provinsi Sumsel mengelola arsip yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Sumsel maupun penarikan (akuisisi) arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Se-Sumsel yang di dapat pada periode tahun 2000 s/d 2016. Pengelolaan Arsip Daerah pada Dinas Kearsipan Prov. Sumsel :
  - Arsip dikelola berdasarkan hasil penerbitan oleh OPD.
  - Memiliki 3 Depo dan 1 *Record Centre* yang perlu dibuatkan tempat yang baru dan layak.
  - Fumigasi arsip Depo dan *Record Centre* sekali dalam setahun.
  - Akuisisi arsip Kabupaten/Kota dan preservasi untuk arsip-arsip statis.
  - Koordinasi ke OPD untuk optimalisasi Arsip In-aktif, Arsip Statis, dan Arsip Penting.
  - Kekurangan SDM Arsiparis
  
- b. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip daerah :
  - Dinas kearsipan Prov. Sumsel merupakan satu – satunya LKD di Indonesia yang terpisah dari perpustakaan artinya mampu untuk mengelola secara keseluruhan baik finansial, SDM serta Sarpras
  - Membutuhkan komitmen pimpinan tertinggi dari berbagai lini
  - Banyak dokumen yang mengandung sejarah di Prov. Sumsel yang akan menjadi arsip masih terbengkalai (belum terdokumentasi dengan baik)
  - Menyangkut pada ketelitian, kepedulian disetiap kegiatan dalam pengarsipan Prov. Sumsel
  - Beberapa hal yang memerlukan perhatian yaitu :
    - ✚ Gedung yang sudah tua
    - ✚ Depo (berada di posisi lantai 2 dan 3 (berbentuk besi brankas). Lantai 1 sebagai tempat ASN bekerja, melaksanakan kegiatan rutin sehari – hari dan terpencar – pencar yang tidak mencukupi/tidak maksimal untuk dijadikan ruang kerja.
    - ✚ Kekosongan jabatan sudah 3,5 tahun tidak terisikan sehingga tidak dapat bekerja sesuai dengan Tupoksi untuk maksimal
  - Terhadap kekuarangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh kearsipan daerah Prov. Sumsel, meminta perhatian dan bantuan dana kepada Komisi II DPR RI dalam pengelolaan kearsipan prov. Arsip Daerah.

## B. EVALUASI DANA DESA.

- a. Evaluasi dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Sejak tahun 2017. Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan telah mengevaluasi penggunaan dana desa sebanyak 2 (dua) kali pertahun.
- c. Dalam hal ditemukan dugaan Tipikor ditangani oleh Inspektorat Kab/Kota dan Aparat Penegak Hukum (APH).

### C. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel.

Terhadap persiapan pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Selatan disampaikan sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Pemereintah Prov. Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 10 Februari 2020 bertempat di SMK Negeri 2 Palembang berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun, begitu juga untuk pelaksanaan di Kabupaten/Kota.
3. Disarankan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dasar (SKD) untuk masing – masing formasi jabatan berdasarkan ranking dapat segera diumumkan guna menghindari kecurigaan masyarakat.

### D. Tenaga Honorer

1. Terkait dengan Tenaga Honorer yang akan diberhentikan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang tersebar pada OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap tenaga honorer tersebut yang diperkirakan berjumlah 2.000. Terkait dengan peraturan pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melarang pengangkatan Tenaga Honorer. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mempertimbangkan secara seksama mengingat saat ini hampir seluruh OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kekurangan PNS, dan belum bisa dipenuhi melalui rekrutmen CPNS, oleh sebab itu Tenaga Honorer tersebut tetap akan diberdayakan.
2. Terkait dengan rencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Tenaga Honorer, sebagai berikut :
  - a. memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK
  - b. mengusulkan kebutuhan formasi CPNS atau PPPK kepada Menpan RB mengharapkan Pemerintah Pusat kiranya masih memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan tenaga honorer sampai dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai.

### D. E-KTTPerekaman dan pencetakan E-KTP cukup memuaskan

Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Rekam	Cetak
8.293.017	5.892.508	5.902.359	6.447.954

### E. Pemilukada Serentak 2020

- a. Pemilukada Serentak 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten.
- b. NPHD telah dianggarkan sesuai ketentuan.
- c. Pembentukan Desk Pilkada untuk monitoring.

### III. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### 1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PILKADA

- UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Th. 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Th. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.
- UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
- PKPU 16/2019 tentang Perubahan atas PKPU 15/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Th. 2020.
- PKPU 18/2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- PKPU 19/2019 tentang Perubahan atas PKPU 2/2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### 2. REKAPITULASI PENERIMAAN DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2020

NO	KABUPATEN	NOMOR NPHD	TANGGAL NPHD	NPHD (Rp)	PENCAIRAN 2019 (Rp)	TANGGAL PENCAIRAN 2020	PENCAIRAN 2020 (Rp)
1	Ogan Komerling Ulu	Nomor: 92/PEMKAB-OKU/2019	14/10/2019	40,500,000,000	2,000,000,000	30/1/2020	15,400,000,000
		Nomor: 01/KU.07-NK/1601/KPU-KAB/X/2019				15/6/2020	19,250,000,000
						10/8/2020	3,850,000,000
2	Musi Rawas	Nomor: 011/NPHD/III/BP KAD/2019	01/10/2019	45,350,000,000	350,000,000	23/1/2020	18,000,000,000
		Nomor: 435/Kpts/1605/KPU-Kab/X/2019				Maret 2020	27,000,000,000
3	Ogan Komerling Ulu Timur	Nomor: 1/MoU/III/2019	01/10/2019	47,000,000,000	1,000,000,000	04/2/2020	18,400,000,000
		Nomor: 96/PR.07-NK/1608/KPU-KAB/X/2019				15/5/2020	23,000,000,000
						15/8/2020	4,600,000,000
4	Ogan Komerling Ulu Selatan	Nomor: 797/KPTS/BPKAD/2019	01/10/2019	45,000,000,000	18,000,000,000	Maret 2020	22,500,000,000
		Nomor: 92/KU.07-SD/1609/KPU-KAB/X/2019				Agustus 2020	4,500,000,000
5	Ogan Ilir	Nomor: 172/KU.07-NPHD/1610/KPU.KAB/X/2019	03/10/2019	50,000,000,000	1,000,000,000	04/2/2020	19,600,000,000



		Nomor: 900/046/HIBAH/ VIII/2019				4 Bulan Sebelum hari Pemungutan Suara	29,400,000,000
6	Penukal Abab Lematang Ilir	Nomor: 057/KPTS/BPKA D/2019	27/9/2019	41,500,000,000	1,500,000,000	29 Januari 2020	16,000,000,000
		Nomor: 287/NPHD- KU.01.1/1612/K PU-Kab/IX/2019				10 Mei 2020	20,000,000,000
						10 Agustus 2020	4,000,000,000
7	Musi Rawas Utara	Nomor: 181/NPHD/BKD/ MRU/2019	01/10/2019	28,000,000,000	3,000,000,000	24 Februari 2020	25,000,000,000
		Nomor: 131/1613/KPU.K ab/X/2019					

### 3. Tahapan Pembentukan & Masa Kerja BADAN AD HOC

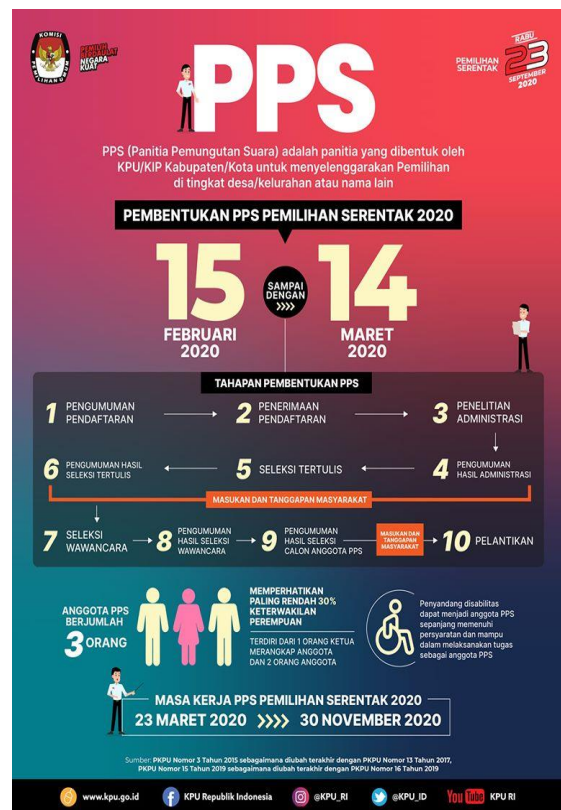
Dasar “ PKPU Nomor 16 Tahun 2019” Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

No	BADAN ADHOC	PEMBENTUKAN	MASA KERJA
1	PPK	15 Januari – 14 Februari 2020	01 Maret – 30 November 2020
2	PPS	15 Februari – 14 Maret 2020	23 Maret – 30 November 2020
3	PPDP	26 Maret – 15 April 2020	16 April– 17 Mei 2020

### 4. REKAPITULASI JUMLAH PEREKRUTAN PPK DAN PPS PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PROVINSI SUMATERA SELATAN

N O	Kabupaten	Kec	Kel	TPS	PPK	PPS	KPPS	PPDP
1	OGAN ILIR	16	241	860	80	723	6.020	860
2	PALI	5	71	320	25	213	2.240	320
3	MUSI RAWAS	14	199	605	70	597	4.235	605
4	MURATARA	7	89	420	35	267	2.940	420
5	OKU	13	157	718	65	471	5.026	718
6	OKU TIMUR	20	312	1.250	100	936	8.750	1.250
7	OKU SELATAN	19	259	800	95	777	5.600	800
<b>JUMLAH</b>		<b>94</b>	<b>1.328</b>	<b>4.973</b>	<b>470</b>	<b>3.984</b>	<b>34.811</b>	<b>4.973</b>

## 5. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS



## 6. JADWAL DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 HARI	15-17 Februari 2020	
2	Penerimaan pendaftaran di Kab/Kota	7 HARI	18-24 Februari 2020	
3	Perpanjangan pendaftaran	3 HARI	-	25-27 Februari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 HARI	25-27 Februari 2020	28 Februari - 1 Maret 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 HARI	28-29 Februari 2020	2 - 3 Maret 2020
6	Seleksi Tertulis	1 HARI	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 HARI	2 - 4 Maret 2020	5 - 7 Maret 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 HARI	5 – 7 Maret 2020	7 – 9 Maret 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 HARI	28 Februari – 7 Februari 2020	2 – 10 Maret 2020
10	Wawancara	3 HARI	10 – 12 Maret 2020	11 – 13 Maret 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 besar)	3 HARI	15 – 17 Maret 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 HARI	15 – 17 Maret 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 HARI	18 – 19 Maret 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 HARI	20 – 21 Maret 2020	
15	Pelantikan PPS	-	22 Maret 2020	
16	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 – 30 November 2020	

## 7. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH

- Saat Ini KPU Kabupaten sedang melakukan proses Pemetaan TPS sebagai tindak lanjut Surat KPU RI Nomor : 2264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal : Pemetaan TPS dan Surat KPU RI Nomor : 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 Perihal : Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
- KPU Kabupaten juga saat ini sedang melakukan proses Pencermatan terhadap DP4 sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 158/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 Perihal : Pencermatan DP4

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
2	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		

a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

## 8. TAHAPAN CALON PERSEORANGAN

Saat ini, KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tahapan Calon Perseorangan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati seluruh daerah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun dasar yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah KEPUTUSAN KPU NOMOR 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

No		KEGIATAN	AWAL	AKHIR
		PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a.		Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.		Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1.	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3.	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.		Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
e.		Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f.		Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g.		Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020
h.		Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi	25 April 2020	26 April 2020
i.		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota	27 April 2020	28 April 2020

Berdasarkan laporan dan Salinan Keputusan yang diterima KPU Provinsi Sumsel dari 7 Kabupaten, rekapitulasi Penetapan Syarat Minimum dukungan Calon Perseorangan, adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	JUMLAH DPT	PERSENTASE JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN	JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH MINIMUM SEBARAN	NO DAN TANGGAL SK
1	MUSI RAWAS	289.544	8,5%	24.612	14	8	438/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
2	MUSI RAWAS UTARA	148.678	10%	14.868	7	4	220/PL.02.2-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
3	OGAN ILIR	288.973	8,5%	24.563	16	9	488/HK.03.1-Kpt/1610 /KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
4	OKU	258.062	8,5%	21.936	13	7	3/PL.02.2-Kpt/KPU/1613/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
5	OKU SELATAN	269.099	8,5%	22.874	19	10	174/HK.03.1-Kpt/1609 /KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
6	OKU TIMUR	487.124	8,5%	41.406	20	11	38/PL.03.2-Kpt/1608/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019
7	PALI	131.576	10%	13.158	5	3	243/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019

**BAKAL CALON PERSEORANGAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PILKADA SERENTAK TAHUN 2020  
DI SUMATERA SELATAN**

NO	KABUPATEN	BAPASLON	SYARAT MINIMUM		JUMLAH B.1-KWK			JUMLAH B.1.1-KWK	SEBARAN	STATUS	TANGGAL BA
			DUKUNGAN	SEBARAN	DISERAHKAN	MS	TMS				
1	MUSI RAWAS UTARA	Drs. H. AKISROPI AYUP, SH., M.Si DAN BAIKUNI, S.Pt	14,868	4	17,117	17,052	65	17,117	7	DITERIMA	23 FEBRUARI 2020
2	MUSI RAWAS	1. AKMALUDIN, SE DAN TRIONO, SE., M.Si	24,612	8	30,735	29,225	1,510	30,735	14	DITERIMA	26 FEBRUARI 2020
		2. WAZANAZI WAHD, SE DAN HAIRUL, S.Kom.I	24,612	8	-	-	-	-	-	BATAL MENYERAHKAN	-
3	OGAN KOMERING ULU	1. YUSMAN GUSNUL DAN RADIUS SUSANTO,SE	21,936	7	-	-	-	-	-	BATAL MENYERAHKAN	-
		2. AGUSTIAN AMBARI DAN DODI CAHYADI	21,936	7	-	-	-	-	-	BATAL MENYERAHKAN	-
		3. MELAN TOMY DAN MARZULI	21,936	7	7,424	5,782	1,642	7,302	13	DITOLAK	23 FEBRUARI 2020
4	OKU TIMUR	KOL. INF. H. RUSLAN, SE., MM DAN dr. HERLY SUNAWAN, SH	41,406	11	48,766	47,445	1,321	48,766	20	DITERIMA	23 FEBRUARI 2020

**IV. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**1. NPHD BAWASLU KABUPATEN PENYELENGGARA PILKADA TAHUN 2020**

PENERIMA HIBAH	TANGGAL	NILAI NPHD (Rp)
BAWASLU KAB. MUSI RAWAS	05/ November/ 2019	17.250.000.000
BAWASLU KAB. MUSI RAWAS UTARA	29/ Oktober/ 2019	9.200.000.000
BAWASLU KAB. OGAN ILIR	11/ Oktober/ 2019	19.350.000.000
BAWASLU KAB. OGAN KOMERING ULU	29/ Oktober/ 2019	13.500.000.000
BAWASLU KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	29/ Oktober/ 2019	15.000.000.000
BAWASLU KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	29/ Oktober/ 2019	16.500.000.000
BAWASLU KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	29/ Oktober/ 2019	16.000.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>106.800.000.000</b>

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten adalah dalam hal pencairan. Hingga saat ini Kabupaten Muratara dan PALI nominal yang dicairkan masih sangat minim. Kabupaten Muratara dari Nominal Rp9,2 miliar barudua persen yang dicairkan atau senilai Rp200 juta. Sementara untuk PALI dari nominal Rp16 miliar yang telah disepakati, dana yang telah dicairkan Rp1 Miliar. Secara total dari Rp106,8 miliar yang disepakati jumlah yang telah dicairkan Rp34,6 miliar. Masih kurang Rp72,2 miliar.

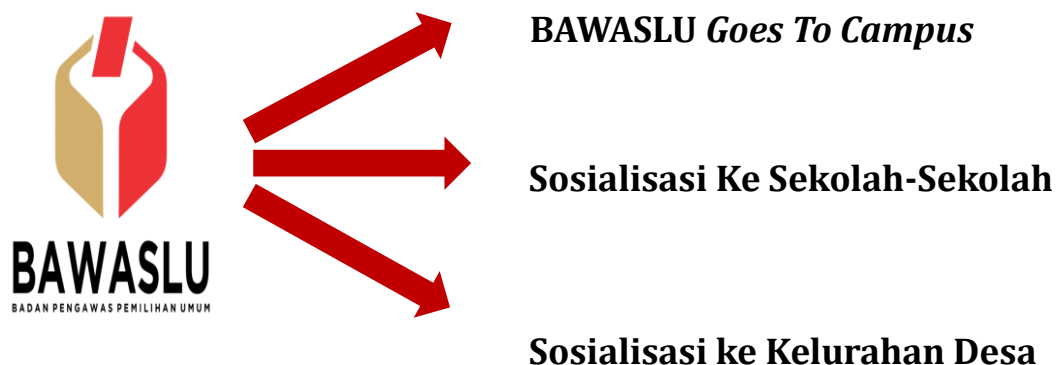
2. Terkait penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Provinsi Sumsel terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumsel terkait daftar pemilih. Untuk pilkada tahun 2020, saat ini belum pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Masih menunggu penyerahan DP4 dari pemerintah untuk kemudian diturunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

### PEMUTAKHIRAN DPT



3. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan beragam program untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan pemilih pemula. Program-program yang telah dilaksanakan antara lain Bawaslu Goes to Campus, Sosialisasi kesekolah - sekolah, dan Sosialisasi ke desa/kelurahan. Program-program tersebut juga dilakukan pada pemilu serentak tahun 2019.

### PENGAWASAN PARTISIPATIF





4. Terkait dengan pemetaan potensi Kerawanan Pilkada, maka strategi yang dilakukan untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut adalah :
- Mengenai tingkat kerawanan dengan melakukan pemetaan berbasis riset keseluruhan daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2020.
  - Pada IKP tingkat Kabupaten/kota tingkat kerawanan terbagi atas tiga tingkat kerawanan, yakni Rawan Rendah (skor 0-43,06); Rawan Sedang (skor 43,07- 56,94) ; dan Rawan Tinggi (skor 56,95 – 100). Untuk Sumatera Selatan tingkat kerawanan di tujuh Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada masuk dalam kategori kerawanan rendah dan sedang.
  - Dari total 261 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020, IKP Pilkada Tahun 2020 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan nasional sebagai berikut :

#### IKP 7 KABUPATEN SUMSEL

NO	PERINGKAT NASIONAL	KABUPATEN	IKP PILKADA 2020	KATEGORI
1	173	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	47,85	level 3
2	178	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	47,69	level 3
3	201	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	46,62	level 3
	241	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	44,26	level 3
	252	KABUPATEN MUSI RAWAS	43,15	level 3
	259	KABUPATEN OGAN ILIR	42,17	level 2
	255	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	42,81	level 2

RENDAH		SEDANG		TINGGI	
	36,13	43,07	50,01	56,95	
<36,12	43,06	50,00	56,94	63,88	>63.88
<b>LEVEL 1</b>	<b>LEVEL 2</b>	<b>LEVEL 3</b>	<b>LEVEL 4</b>	<b>LEVEL 5</b>	<b>LEVEL 6</b>

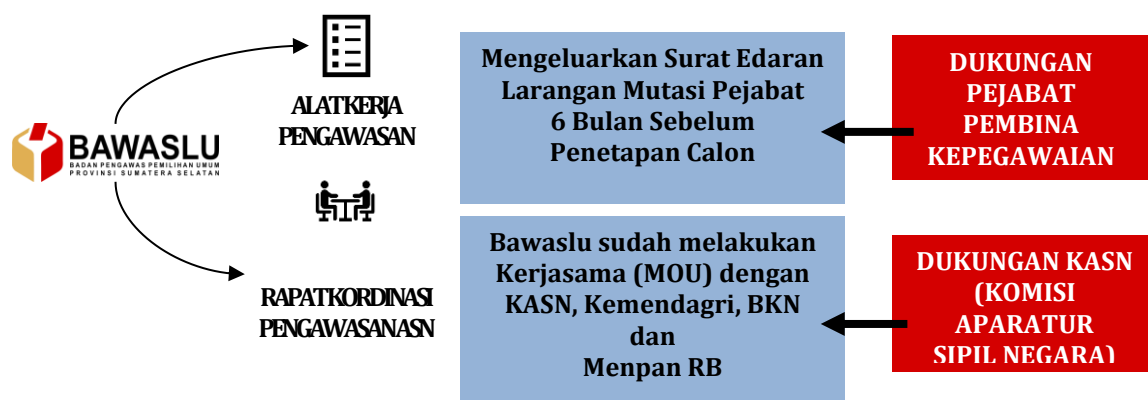
Adapun rincian data IKP Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut ;

No	Kabupaten	IKP Pilkada Kab 2020	Urutan Nasional	Kategori	Dimensi			
					KSP	PPBA	Kontestasi	Partisipasi Politik
1.	Ogan Komering Ulu Timur	47,85	173/261	Level 3	48,62	44,07	38,56	69,35
2.	Penukal Abab Lematang Ilir	47,69	178/261	Level 3	44,86	50,78	38,56	62,35
3.	Ogan Komering Ulu	46,62	201/261	Level 3	43,42	43,78	38,56	72,15
4.	Musi Rawas Utara	44,26	241/261	Level 3	45,36	42,37	38,56	55,35
5.	Musi Rawas	43,15	252/261	Level 3	43,42	41,84	38,56	52,90
6.	Ogan Komering Ulu Selatan	42,81	255/261	Level 2	43,47	43,45	38,56	47,30
7.	Ogan Ilir	42,17	259/261	Level 2	41,55	41,84	38,56	50,10

#### IKP BAWASLU KABUPATEN PENYELENGGARA PILKADA TAHUN 2020

Kab/Kota	IKP Pilkada Kab/Kota 2020	Kategori	Konteks Sosial Politik	Pemilu Yang Bebas Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
Kabupaten Ogan Ilir	42,17	level 2	41,6	41,8	38,56	50,1
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	42,81	level 2	43,5	43,5	38,56	47,3
Kabupaten Musi Rawas	43,15	level 3	43,4	41,8	38,56	52,9
Kabupaten Musi Rawas Utara	44,26	level 3	45,4	42,4	38,56	55,35
Kabupaten Ogan Komering Ulu	46,62	level 3	43,4	43,8	38,56	72,15
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	47,69	level 3	44,9	50,8	38,56	62,35
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	47,85	level 3	48,6	44,1	38,56	69,35

- Sementara untuk Sentra Gakkumdu, tahapan pembentukannya baru dimulai pada Maret 2020. Dalam minggu ini, institusi Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan tingkat provinsi, baru akan melaksanakan rapat pembentukan Sentra Gakkumdu.
- Bawaslu sudah menyiapkan alat kerja pengawasan netralitas ASN. Pada bulan Maret ini, sekitar pertengahan juga Bawaslu Provinsi akan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan ASN. Untuk dukungan dari PPK, Pemprov Sumsel telah mengirimkan surat edaran pada tanggal 7 Januari 2020 mengenai larangan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan calon.



- Sementara untuk dukungan KASN, Bawaslu RI melakukan kerjasama dengan KASN, untuk pengawasan netralitas ASN. Dalam hal pengawasan ASN, Bawaslu juga melakukan kerjasama dengan Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN.
- Pembentukan pengawas *ad hoc* untuk tingkat kecamatan sudah dilaksanakan. Sudah ada 282 personel Panwascam yang tersebar di 94 kecamatan pada 7 kabupaten yang menggelar pilkada. Saat ini sedang dilakukan perekrutan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) di 7 Kabupaten. Dijadwalkan PKD yang diterima akan diumumkan 12 Maret 2020.

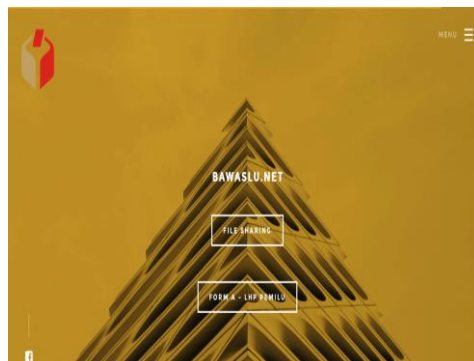
KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH PANWASCAM	JUMLAH PKD
Penual Abab Lematang Ilir	5	6	65	15	71
Musi Rawas Utara	7	7	82	21	89
Ogan Komering Ulu	13	14	143	39	157
Musi Rawas	14	13	186	42	199
Ogan Ilir	16	14	227	48	241
Ogan Komering Ulu Selatan	19	7	252	57	259
Ogan Komering Ulu Timur	20	7	305	60	312
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>68</b>	<b>1260</b>	<b>282</b>	<b>1328</b>

9. Penyampaian laporan hasil pengawasan telah disampaikan Bawaslu Provinsi Sumsel ke Bawaslu RI pada setiap tahapan pengawasan, melalui Google Form dalam bentuk Google Doc; atau Google Sheet.

**Secara Serentak Menggunakan Sistem**

**Penuangan dalam bentuk Form A secara Online**

**Implementasi mulai 3 Februari**



10. Permasalahan yang harus menjadi perhatian khusus pada pilkada serentak adalah distribusi DPT, distribusi logistik, netralitas ASN, DPT, hoaks di sosial media.



**DPT**



**LOGISTIK**



**NETRALITAS ASN**



**HOAX**

## **LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE KANTOR BPN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 2 s.d 6 Maret 2020 dan telah diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berikut:

- Sekjen Kementerian ATR/BPN RI
- Direktur Bidang Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI
- Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN RI
- Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kakan BPN Se-Provinsi Sumatera selatan.
- Perwakilan Pemerintah

Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.

### **HASIL KUNJUNGAN KERJA**

#### **A. Perkembangan Reform Agraria**

##### **1) Legalisasi Aset melalui Redistribusi Tanah**

- Pelaksanaan Redistribusi Tanah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta diperluas dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018

tentang Reforma Agraria. Tujuan Redistribusi Tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah.

- b. Pada Tahun Anggaran 2019, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan target sebanyak 25.000 bidang tanah dan dapat direalisasi sebanyak 14.430 bidang sedangkan Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi kegiatan Redistribusi Tanah sebanyak 15.000 bidang tanah.

**2) Kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur**

Pada prinsipnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum termasuk proyek infrastruktur sudah ditetapkan pada saat penyusunan rencana program dan persiapan pelaksanaan. Lokasi rencana proyek telah diketahui baik letak maupun luasnya, hal ini antara lain dapat dilihat telah contoh: ditetapkan trase jalan tol, lokasi bendungan dan lain sebagainya.

**3) Program standarisasi terhadap juru ukur bersertifikat yang akan bekerja di bawah pengawasan BPN untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia**

Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengidentifikasi kebutuhan tenaga surveyor berlisensi dan memberi kesempatan kepada para lulusan SMK, lulusan DI dan DIII universitas setempat yang ada di Sumatera Selatan untuk diserap menjadi tenaga surveyor berlisensi/asisten surveyor berlisensi dengan memberikan ujian khusus untuk standarisasi

**4) Program yang bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.**

**a. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)**

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) merupakan amanat TAPMPR IX/2001 khususnya pasal 5 ayat (1.c) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Reforma Agraria, khususnya pasal 7 ayat (2 dan 3) bahwa pelaksanaan redistribusi tanah didahului dengan pelaksanaan tahapan inventarisasi P4T. Oleh karena itu, kegiatan IP4T diarahkan untuk menunjang kegiatan redistribusi tanah. Hasil Kegiatan IP4T merupakan informasi untuk perencanaan kegiatan pertanahan dan perumusan kebijakan teknis.

**b. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)**

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

**c. Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota**

- Perubahan penggunaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, yaitu : **pertama**, perubahan yang terencana berdasarkan RTRW misalnya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol, bandara, waduk, pelabuhan dan lainnya; **Kedua**, perubahan yang tidak direncanakan seperti pembangunan oleh masyarakat atau badan hukum dalam rangka investasi.
- Monitoring penggunaan tanah merupakan kegiatan pemantauan atas terjadinya perubahan penggunaan tanah yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung pemenuhan data spasial secara simultan (serentak) seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga perubahan penggunaan Tanah dapat termonitor dengan mudah. Kedepannya, pembaharuan data akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.

**5) Hambatan pelaksanaan program legalisasi asset dan program memperbaiki porsi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.**

Adapun hambatan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sulitnya mengumpulkan masyarakat calon penerima manfaat/redistribusi karena mereka umumnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Masyarakat umumnya belum mempunyai e-KTP dan alas hak.
- c. Para petani belum memahami akan pentingnya sertipikat hak atas tanah dan kekhawatiran petani akan kenaikan pajak bila sudah terbit sertipikat.
- d. Masyarakat tidak bersedia disertipikatkan karena jika terkena BPHTB masyarakat tidak mampu untuk membayarnya. Kondisi medan/lokasi yang berat dan letaknya yang relatif jauh (sulit dijangkau) dan *Force Majeur* (jalan menuju lokasi terendam, lokasi terendam, lokasi yang akan dituju tergenang).
- e. Adanya sebagian lokasi redistribusi tanah yang terdapat pemekaran wilayah kabupaten sehingga terjadi tanah *absentee*.
- f. TOL Lama sudah berubah penggunaannya dan subjek redistribusi tanah tidak memenuhi ketentuan redistribusi tanah.

**B. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Pemetaan, registrasi, dan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan.

## **1. Jumlah Bidang**

### **PETA BIDANG TANAH (PBT):**

- a. Target Peta Bidang Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 223.691 Bidang yang terdiri dari:
  - Sebanyak 173.691 bidang target PBT dengan sumber dana Rupiah Murni yang dilaksanakan oleh ASN; dan
  - Sebanyak 50.000 bidang target PBT dengan sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
- b. Realisasi Peta Bidang Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 220.459 Bidang yang terdiri dari:
  - Sebanyak 200.459 bidang PBT dengan sumber dana Rupiah Murni yang dilaksanakan oleh ASN; dan
  - Sebanyak 20.000 bidang PBT dengan sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.

## **2. SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (SHAT):**

- a. Target Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 120.910 Bidang yang terdiri dari:
  - Sebanyak 104.910 bidang target SHAT ASN dengan sumber dana Rupiah Murni; dan
  - Sebanyak 16.000 bidang target SHAT Partisipasi Masyarakat dengan sumber dana Rupiah Murni.
- b. Realisasi Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 92.709 Bidang yang terdiri dari:
  - Sebanyak 85.153 bidang SHAT ASN dengan sumber dana Rupiah Murni; dan
  - Sebanyak 7.556 bidang SHAT Partisipasi Masyarakat dengan sumber dana Rupiah Murni.

## **3. Anggaran**

### **PETA BIDANG TANAH (PBT):**

- a. Target Anggaran Peta Bidang Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 47.486.908.000,- dengan rincian :
  - Sebesar Rp. 28.645.058.000,- target anggaran PBT dengan sumber dana Rupiah Murni; dan
  - Sebesar Rp. 18.841.850.000,- target anggaran PBT dengan sumber dana Pinjaman Hibah Luar.
- b. Realisasi Anggaran Peta Bidang Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 31.848.502.538,- dengan rincian :
  - Sebesar Rp. 27.601.426.460,- realisasi anggaran PBT dengan sumber dana Rupiah Murni; dan

- Sebesar Rp. 4.247.076.078,-realisasi anggaran PBT dengan sumber dana Pinjaman Hibah Luar.

**4. SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (SHAT):**

- Target Anggaran Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebesarRp. 17.691.800.000,-dengan sumber dana Rupiah Murni.
- Realisasi Anggaran Sertipikat Hak Atas Tanah Tahun 2019 Satuan Kerja dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.283.697.188,- dengan sumber dana Rupiah Murni.

**5. SDM dalam PTSL**

No.	Kantor Pertanahan	PNS	ASKB
1	2	3	4
1	Kanwil Provinsi Sumatera Selatan	12	-
2	Kantah Kabupaten Empat Lawang	6	1
3	Kantah Kab. Musi Rawas	9	10
4	Kantah OKU Selatan	5	7
5	Kantah kabupaten Musi Banyuasin	5	6
6	Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau	8	10
7	Kantah kabupaten Ogan Komering Ulu	7	9
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir	5	6
9	Kantah Kabupaten Musi Rawas Utara	2	-
10	Kantah Kabupaten Lahat	9	2
11	Kantah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	5	2
12	Kantah Ogan Ilir	8	5
13	Kantah Kota Prabumulih	5	3
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin	8	12
15	Kantah Kota Palembang	10	21
16	Kantah Pertanahan Muara Enim	9	4
	Kantah Kota Pagar Alam	5	6
	<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>104</b>

- Alat Ukur Berteknologi yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Yaitu
  - 20 set GNSS RTK Comnav T300
  - 9 set GNSS RTK CHC NAV 150
  - 58 set GNSS RTK South Galaxy 1

Masing-masing alat ukur tersebut sudah didistribusikan ke kantor pertanahan



7. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Provinsi Sumatera Selatan
  - a. Belum ada pemahaman masyarakat terkait pentingnya tanda batas terutama bagi yang tidak berkeinginan untuk membuat sertipikat.
  - b. Pemilik bidang yang tidak berdomisili di desa/ kelurahan atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat/ tokoh masyarakat/ perangkat desa / puldatan.
  - c. Belum jelasnya batas desa sehingga kades/Lurah tidak mau memutuskan karena akan menimbulkan potensi masalah baik antar desa maupun dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beranggapan bahwa terjadi hilangnya wilayah desa.
  - d. Pelaksanaan pengumpulan data yang dilaksanakan oleh puldatan terhambat karena enggannya pemilik tanah menyerahkan berkas yuridis apabila bidang tanah yang diukur tidak jadi sertipikat.
  
8. Terkait dengan SDM, peralatan dalam pelaksanaan kegiatan survey pengukuran dan pemetaan, hingga saat ini BPN Sumatera Selatan tidak ada hambatan karena jumlah SDM mencukupi dan dibantu surveyor/ Asisten surveyor berlisensi serta adanya bantuan alat ukur dari pusat.

### **C. Kasus Pertanahan**

1. Terdapat 10 Kasus strategis yang saat ini sedang ditangani, umumnya konflik yang terjadi adalah antara masyarakat dengan perusahaan maupun Badan hukum privat maupun publik;
2. Penanganannya melalui mediasi, rapat internal maupun external yang melibatkan stakeholder terkait yang menghasilkan cara-cara dalam rangka penyelesaian masalah;
3. Saat ini kita sedang menghadapi rapat-rapat yang melibatkan instansi terkait sebagai tindak lanjut sebagai tindak lanjut aksi demo tanggal 10 desember 2019 di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan oleh komite reforma agraria sumatera selatan (KRASS).

### **D. Rencana Tata Ruang Wilayah**

1. **Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembuatan peta dasar pertanahan dan peta tematik untuk wilayah Sumatera Selatan**

Peta dasar pertanahan secara nasional sedang disiapkan oleh Kementerian ATR /BPN pusat, Peta Dasar Pertanahan merupakan *base map* dari *one map policy*, sehingga peta dasar pertanahan ini akan dapat digunakan untuk kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang dan peta tematik lainnya.
  
2. **Hal – hal yang menjadi perhatian khusus terkait masalah ketataruangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan**
  - a. **Alih fungsi Lahan Pertanian sebagai akibat pembangunan fisik**
    - Perubahan pembangunan yang cepat adalah bentuk lain yang akan menyebabkan segera terjadinya alih fungsi lahan, namun kita manusia tidak dapat menolak perkembangan dan kemajuan, kita hanya mampu untuk mengendalikannya.
    - Perkembangan industry kelapa sawit juga mendorong masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendukung beralihnya

lahan-lahan tanah pertanian yang subur menjadi non pertanian (perkebunan kelapa sawit).

**b. Perkembangan transportasi darat khususnya jalan lintas**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu perkembangan pembangunan adalah dengan di bukanya jalan-jalan penghubung sebagai bagian dari pelaksanaan dalam mensejahterakan rakyat, Sumatera Selatan, salah satunya yaitu dengan dibangunnya jalan tol yang direncanakan melintasi Pulau Sumatera, jalan tol yang dibangun melintasi tempat-tempat yang semula belum tersentuh dengan akses jalan Negara, sebagai akibatnya terjadi perkembangan dalam bentuk harga tanah, okupasi-okupasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat, bergesernya batas kawasan hutan, terpakainya lahan gambut, berubahnya fungsi kawasan dalam tataruang dan perkembangan social ekonomi dan Hankam. Sepanjang jalan tersebut akan tumbuh sentral - sentral ekonomi baru dan tertutupnya sentral ekonomi masyarakat yang lama dengan harus diantisipasi dengan beralihnya kegiatan ekonomi / pekerjaan.

**c. Pertambangan**

Bahan tambang adalah asset bangsa yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun dalam pengelolaannya pengelolaan terdapat berbagai kepentingan disana, sehingga secara langsung atau tidak langsung menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Penambangan minyak bumi (yang mungkin dapat kita katakan illegal) yang berasal dari sumur-sumur tambang sisa dari pertambangan zaman Kolonial Belanda turut menambah gesekan penata ruangan di daerah

**d. Bencana Alam**

Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, namun manusia diberi akal pikiran untuk dapat mengatasi hal tersebut. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran lahan adalah bentuk-bentuk bencana alam yang harus baik penanganannya

**e. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau adalah permasalahan yang terkadang terlupakan dalam penyusunan Tata Ruang padahal Ruang Terbuka Hijau ini sangat banyak manfaat dan fungsinya antara lain berupa Rencana Penyediaan dan pemanfaatan pra sarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pusat-pusat pelayanan social ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

**f. Regulasi yang dilakukan:**

- UU No. 26 Tahun 2007 ttg. Penataan ruang
- PP No. 26 Tahun 2008 ttg. RTRW
- PP No. 68 Tahun 2007 ttg. Bentuk dan Tata Cara Peran masyarakat dalam Penataan Ruang
- PP No. 15 Tahun 2010 ttg. Penyelenggaraan Penataan Ruang

**3. Dukungan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan terhadap penerbitan RTRW dan RDTR di Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam Program penerbitan RTRW dan RDTR yang dilakukan oleh setiap kabupaten / kota, posisi BPN adalah pengguna data dalam hal penerbitan Sertipikat Hakatas Tanah dengan telah diterbitkannya RTRW dan / atau RDTR tentu saja program pensertipikatan tanah akan lebih cepat diterbitkan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

**E. Arsip Warkah**

Digitalisasi arsip warkah telah dilaksanakan melalui scan warkah dan buku tanah dengan menggunakan Jasa Pihak Ketiga, contoh untuk kantor pertanahan Kota Palembang tahun 2019 sebanyak 97.487 warkah, Buku Tanah, SK, SU, GU dengan menggunakan Jasa PT. HEXSA INDOTECH CONSULTAN.

**F. Formasi Kanwil BPN Sumatera Selatan dalam penerimaan CPNS tahun 2019**

Jumlah Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, sedangkan jumlah kebutuhan pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2019 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang. Berdasarkan hal tersebut masih ada kekurangan jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) orang.

**Kebutuhan RIIL Pegawai Kanwil BPN SUMSEL**

NO	SATKER	KEBUTUHAN PEGAWAI						JUMLAH RILL PEGAWAI SAAT INI			FORMASI SELEKSI CPNS 2019	KEBUTUHAN
		PEJABAT STRUKTURAL			STAFF			PEJABAT STRUKTURAL	STAF	Jumlah		
		Tersedia	Kekurangan	Jumlah	Tersedia	Kekurangan	Jumlah					
1	KANTOR WILAYAH	26	0	26	55	21	76	26	55	81	0	-21
2	16 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA	259	77	336	132	540	672	259	132	391	36	-581
TOTAL		285	77	362	187	561	748	285	187	472	36	<b>-602</b>

## **V. PENUTUP**

Demikian, laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 - 2020, sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera selatan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Kepada Semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 23 Maret 2020**

**KETUA TIM  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI**

**DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI,M.T**

**Lampiran :**

**FOTO – FOTO KEGIATAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN  
MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG II 2019-2020  
TANGGAL 2 S.D 6 MARET 2020**





Lampiran :

**FOTO – FOTO KEGIATAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE KANTOR BPN PROVINSI SUMATERA  
SELATAN MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG II 2019-2020  
TANGGAL 2 S.D 6 MARET 2020**



